



TRANSFORMASI

Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam

VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2018

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN
KEPRIBADIAN ANAK

Abdullah

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PERGURUAN
TINGGI AGAMA ISLAM DAN PENGARUHNYA
TERHADAP MANAJEMEN KELEMBAGAAN

Ahmad Zaenuri

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM
NONFORMAL AIMAS KABUPATEN SORONG

Muhammad Rusdi Rasyid

INTRODUCING NEW RELIGIOUS IDEAS TO
MATHLA'ULANWAR: KH. UWES ABU BAKAR
(1939-1973)

Iman Wahyuddin

PRINSIP PENDIDIKAN NILAI TAFSIR AL-AZHAR

Ahmad Syarif H

OPTIMALISASI PENDIDIKAN REGULASI PRANIKAH
PADA KUA BAROMBONG

Sudirman & Kasjim Salenda



**PASCASARJANA IAIN SORONG
PAPUA BARAT**



**TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA
ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP MANAJEMEN
KELEMBAGAAN**

Ahmad Zaenuri

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam
Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

zaenuriahmad@iaingorontalo.ac.id

Abstract

Perubahan status lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) membawa dampak pada sejumlah bidang, diantaranya; bertambahnya program studi, penambahan dosen, anggaran dan sejumlah fasilitas lainnya. Perubahan tersebut diharapkan dapat menjadikan lembaga pendidikan tinggi Islam akan semakin lebih baik. Perubahan bentuk kelembagaan turut merubah manajemen kelembagaan yang cukup mendasar. Beberapa universitas Islam negeri mampu melewati ini, namun beberapa universitas Islam yang baru sangat membutuhkan manajemen kelembagaan yang lebih baik guna mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini hendak mengungkap pengaruh transformasi kelembagaan pendidikan tinggi Islam terhadap manajemen lembaga pendidikan dengan pendekatan fenomenologis. Bahasannya diulas secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan PTAI membawa dampak pada perubahan manajemen bidang kemahasiswaan, dosen, kurikulum, sarana prasarana dan pengelola.

Kata Kunci: Transformasi, PTAI, Manajemen Lembaga

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin terbuka menuntut lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam (selanjutnya disingkat PTAI) untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi PTAI agar tetap menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi pilihan masyarakat. Sebab hanya lembaga pendidikan yang mampu memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang baiklah, yang akan mendapat kepercayaan dari masyarakat lokal, nasional dan internasional. Dengan demikian, maka pengelolaan lembaga PTAI membutuhkan berbagai teori dan konsep penataan, di samping sebagai upaya pemenuhan standar sebagai lembaga pendidikan yang layak menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penataan ini pula dapat dipahami sebagai ikhtiar meningkatkan mutu pendidikan dalam perspektif kelembagaan.¹

Di antara masalah yang acap kali dihadapi PTAI yaitu tentang stigma negatif masyarakat yang beranggapan bahwa PTAI merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam yang hanya melahirkan cerdik pandai dalam hal agama, sedangkan ilmu-ilmu umum lainnya terabaikan. Pandangan seperti ini menjadikan PTAI hanya diminati oleh beberapa kalangan saja seperti santri, sementara basis masa yang lebih besar dari lembaga pendidikan umum lainnya justru menganggap PTAI sebagai lembaga pendidikan pilihan kedua.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk merespon pelbagai kebutuhan di atas yaitu dengan transformasi kelembagaan PTAI dari STAIN atau IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).² Perubahan IAIN, atau apalagi STAIN menjadi UIN menurut Mujamil Qomar memiliki implikasi yang luas, baik menyangkut posisi kelembagaan, peluang pembukaan program studi, persaingan akademik, maupun meminimalisir dikotomi ilmu agama dan ilmu umum.³ Dengan semangat integrasi ilmu (ilmu agama dan ilmu umum) dan melalui perubahan bentuk kelembagaan, yang secara diikuti dengan perubahan manajemen lembaga, menjadi harapan besar umat Islam agar lembaga

¹Nizar Ali & Ibi Syatibi, *Manajemen Pendidikan Islam: Ikhtiar Menata Kelembagaan Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Isfahan, 2009), hlm. 191.

²Hingga saat ini terdapat sebanyak 17 Universitas Islam Negeri (UIN) di seluruh Indonesia sebagai peralihan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Perubahan status tersebut berdampak pada sejumlah konsekuensi, antara lain: Bertambahnya Program Studi, penambahan dosen, anggaran dan sejumlah fasilitas lainnya. Khoiron, www.kemenag.go.id/berita/read/490558. Diakses pada tanggal 19 November 2017.

³Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (Malang: Erlangga, 2007), hlm. 115.

pendidikan tinggi Islam juga memiliki andil di kancah nasional maupun internasional.

Melalui tulisan ini, akan diulas tentang transformasi kelembagaan pendidikan tinggi Islam (khususnya STAIN atau IAIN Menjadi UIN) dan pengaruhnya terhadap manajemen lembaga pendidikan tinggi Islam.

PEMBAHASAN

A. PERKEMBANGAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PTAIN

1. Sejarah Berdirinya PTAIN

Jika dilihat dari sisi tanggung jawab dalam pengelolaan, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) terpolarisasi menjadi dua, yaitu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). PTAIN dikelola dan didanai hampir sepenuhnya oleh pemerintah/Negara, sedangkan PTAIS dikelola dan didanai hampir sepenuhnya oleh swasta.

Dari segi ruang lingkup program studi yang ditawarkan PTAIN terpolarisasi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Universitas Islam Negeri (UIN). Begitu pula PTAIS yang terpolarisasi menjadi sekolah tinggi, institut, atau universitas dengan menggunakan nama Islam maupun tokoh muslim. Disamping itu, PTAIS juga mencakup *ma'had 'aly* (pesantren luhur atau pesantren setingkat perguruan tinggi) yang menggunakan nama *ma'had 'aly* maupun nama lain, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning (STIKK) di pesantren An-Nur Bululawang, Malang.⁴ Adapun dalam makalah ini penulis akan lebih memfokuskan pembahasan pada lembaga pendidikan tinggi PTAIN.

Berdasarkan sejarah kemunculannya, PTAIN merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengkaji keilmuan Islam. Awalnya adalah Sekolah Tinggi Islam (STI) yang kemudian berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Pada saat itu UII memiliki empat Fakultas dan salah satunya adalah Fakultas Agama. Terjadi tarik menarik kepentingan antara kelompok nasionalis dan Islam. Kemudian untuk melerai dua kepentingan ini pemerintah Orde Lama memberikan perguruan tinggi (universitas) kepada kelompok ini. Untuk nasionalis diberikanlah Universitas Gadjah Mada (UGM) yang pada awalnya merupakan lembaga swasta dan dinegerikan melalui Peraturan Pemerintah

⁴*Ibid.*, hlm. 101.

Nomor 37 Tahun 1950. Sementara untuk kelompok Islam didirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang diambil dari Fakultas Agama UII.⁵ Penerimaan Fakultas Agama menjadi PTAIN ini diatur dalam peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950 yang ditanda-tangani Assaat selaku Pemangku Jabatan Presiden RI. Peresmian PTAIN dilaksanakan pada tanggal 26 September 1951 dihadiri oleh Menteri Agama RI, A. Wahid Hasyim.⁶

Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya tanggal 1 Juni 1957, selain ada PTAIN, di Jakarta berdiri juga Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Mencermati perkembangan yang ada dan karena keinginan yang besar untuk mengembangkan, meningkatkan, dan meluaskan status kelembagaan muncul keinginan untuk menggabungkan PTAIN dan ADIA menjadi sebuah "Institut". Akhirnya, pada tanggal 9 Mei 1960 terbitlah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama *al-Jami'ah al-Islamiyyah al-Hukumiyyah*. Peraturan Presiden ini terbit berkat kesepakatan antara Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K), dan Menteri Agama. Sejak saat itulah Kementrian Agama memiliki kewenangan independen untuk mengawasi dan mengurus IAIN.⁷

IAIN yang merupakan leburan dari PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta akhirnya diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 oleh Menteri Agama Wahid Wahab di Gedung Kepatihan Yogyakarta. Pada saat itu IAIN terdiri atas Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syari'ah (di Yogyakarta), Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Adab (di Jakarta). Dari dua tempat ini kemudian disusullah berdirinya berbagai IAIN di seluruh Indonesia.

2. Perkembangan Transformasi PTAIN

Pada masa pemerintahan Orde Baru pengembangan PTAIN menghadapi berbagai macam kendala. Kendala-kendala tersebut sebagaimana diungkapkan Mujamil Qomar meliputi aspek politis, kultural, sosial dan Psikologis.⁸ Kendala politis itu misalnya terkait dengan pengembangan kelembagaan. Pada masa rezim Soeharto sangat sulit mengubah IAIN menjadi UIN karena tidak didukung *good will*, *political will*, maupun *political power* dari pemerintah. PTAIN seakan mendapat perlakuan yang sangat diskriminatif

⁵Suwito & Abuddin Nata, *Proses Perubahan IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Rekaman Media Massa*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2002), hlm. 34-35.

⁶Muhammad In'am Esha, *Institutional Transformation: Reformasi dan Modernisasi Pendidikan Tinggi Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 69.

⁷*Ibid.*, hlm. 70.

⁸Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam.*, hlm. 102.

berkaitan dengan pendanaan, terutama pada masa Orde Baru. Alokasi dana yang diberikan pada IAIN seluruh Indonesia yang berjumlah 14 IAIN sama dengan satu Perguruan Tinggi Umum Negeri. Ketidakadilan ini juga dirasakan oleh dosen-dosen yang kuliah pada jenjang Pascasarjana. Dana bantuan yang diperoleh para dosen tersebut berjumlah jauh di bawah kawan-kawan dosen di Perguruan Tinggi Umum.

Selain itu, kendala politis dari dalam PTAIN sendiri yang tentunya juga sangat mengganggu perkembangan tradisi akademik yang baik dan mutu pendidikan. Komunitas yang terdapat dalam PTAIN banyak yang berasal dari organisasi pergerakan, padahal pergerakan terkenal memiliki sentuhan politik yang sangat mendalam. Politik biasanya didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu yang saling bertabrakan. Lebih dari itu, orang-orang yang terpengaruh kepentingan tersebut cenderung bersikap praktis dan pragmatis, potong kompas, dan memiliki etos kerja yang sangat lemah, sehingga sulit digerakan untuk mencapai kemajuan lembaga.

Kendala lain yang dihadapi PTAIN adalah kendala kultural. Ada beberapa jenis budaya yang berkembang di PTAIN tetapi tidak kondusif untuk kemajuan lembaga tersebut. Misalnya, motivasi dakwah mendominasi langkah-langkah civitas akademika sehingga berimplikasi pada munculnya kegiatan tanpa perencanaan yang matang, kecenderungan pada penampilan lebih besar daripada karya, upaya konservasi lebih kuat daripada kreasi, kecenderungan menjadi masyarakat yang suka mendengar dan bercakap-cakap (*listening-speaking society*) daripada menjadi masyarakat yang cenderung membaca dan menulis (*reading-writing society*), lebih suka melakukan pendekatan doktrinal daripada pendekatan rasional dan empiris.

Kendala selanjutnya berhubungan dengan dimensi sosial dan masyarakat. Sebagaimana dengan ulasan sebelumnya bahwa masyarakat cenderung melihat PTAIN sebagai lembaga pendidikan kelas dua (*second class*), mengakibatkan sedikitnya minat masyarakat untuk menitipkan anaknya di PTAIN. Hal ini tentu terkait juga dengan lapangan pekerjaan yang tersedia setelah lulus nanti. Sementara itu untuk kendala psikologis dapat dilihat dari budaya masyarakat Indonesia yang belum siap untuk diajak maju, baik masyarakat yang berasal dari level pejabat, kalangan pendidikan, siswa dan mahasiswa, maupun orang tua. Kasus seperti maraknya korupsi, curang dalam UAN, dan sikap apatis masyarakat dapat menguatkan pendapat tersebut.

Berbagai macam kendala yang dihadapi PTAIN tentu memerlukan solusi yang baik demi kemajuan PTAIN kedepan. Selanjutnya, solusi tersebut baru

terasa ketika pada tahun 2002 melalui SK Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah.⁹ Transformasi ini selanjutnya diikuti beberapa IAIN yang terdapat di Indonesia, UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, UIN Malang, UIN Sultan Syarif Qasim di Pekanbaru, UIN Sunan Gunung Djati di Bandung dan UIN Alauddin di Makassar.¹⁰ Hingga saat ini telah terdapat 17 Universitas Islam Negeri di seluruh Indonesia.

Perubahan tersebut tentu diharapkan tidak hanya pada status lembaga, akan tetapi yang lebih penting bagaimana PTAIN dapat menjadi kampus bermutu dan mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi Umum lainnya.

B. MANAJEMEN KELEMBAGAAN PTAIN

Secara lebih khusus berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 74/U/2000 yang disebut Perguruan Tinggi Agama Negeri adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah di lingkungan Departemen Agama.¹¹ Jadi, secara struktural kelembagaan PTAI di bawah naungan Departemen Agama (sekarang menjadi Kementrian Agama). Dari sini diperoleh pemahaman bahwa lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) adalah semua lembaga pendidikan tinggi negeri yang berada dibawah Kementrian Agama, dalam hal ini STAIN, IAIN dan UIN diseluruh Indonesia.

Terbentuknya suatu lembaga pendidikan pasti menuntut adanya beberapa komponen yang saling terkait dan bekerjasama untuk mencapai tujuan. Dalam konteks Indonesia banyak lembaga pendidikan dengan tujuan, kurikulum dan lulusan yang berbeda-beda. Namun diketahui secara umum diketahui bahwa dalam lembaga pendidikan selalu terdapat komponen-komponen penting yang menentukan keberhasilan lembaga tersebut.

Komponen-komponen yang dimaksud adalah:

1. Komponen siswa, yaitu subyek belajar yang menurut jenis dan sifat lembaganya dapat disebut sebagai: siswa, mahasiswa, peserta kursus.
2. Komponen guru, yaitu subyek yang memberikan pelajaran, yang sebutannya dapat: guru, dosen, penyaji, penatar.

⁹Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. vi.

¹⁰Imam Suprayogo & Rasmianto, *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam: Refleksi Perubahan LAIN/STAIN Menjadi UIN*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 58.

¹¹Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Petunjuk Teknis Ketenagaan PTAI*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2004), hlm. 4.

3. Komponen kurikulum, yaitu materi atau bahan pelajaran yang diajarkan, yang memberikan ciri pada lembaga pendidikan tersebut dan mencerminkan kualitas lulusannya.
4. Komponen sarana dan prasarana, yaitu komponen penunjang terlaksananya proses pengajaran.
5. Komponen pengelola, yaitu orang-orang yang mengurus penyelenggaraan lembaga, menyangkut pengelolaan dalam memimpin, mengorganisasikan, mengarahkan, membina, serta mengurus tatalaksana lembaga. Termasuk dalam komponen pengelola adalah; kepala sekolah, petugas bimbingan, pustakawan, staf tata usaha, bendaharawan, pesuruh, penjaga malam.¹²

Kelima komponen tersebut di atas sangat berpengaruh dalam menentukan maju tidaknya suatu lembaga pendidikan. Apabila kelima komponen tersebut baik, maka lembaga pendidikan akan menjadi baik, begitu juga sebaliknya. Untuk melihat lebih jauh manajemen kelima komponen lembaga pendidikan tersebut dalam PTAIN maka akan diuraikan sebagai berikut:

a) Mahasiswa

Di Indonesia terdapat 50-an Perguruan Tinggi Islam Negeri dan tidak kurang dari 350-an perguruan tinggi Islam swasta. Sedangkan lembaga pendidikan dasar dan menengah MI, MTs, dan MA, berjumlah tidak kurang 18% dari seluruh lembaga pendidikan yang berada dibawah Kementrian Pendidikan Nasional.¹³ Namun demikian, semangat yang tinggi terhadap pendidikan Islam ternyata belum menjadikan kebanyakan lembaga pendidikan itu tampak maju, dan menang bersaing dengan jenis lembaga pendidikan lainnya.

Dalam hal input (mahasiswa) yang masuk PTAIN masih tertinggal jauh dari lembaga pendidikan tinggi yang tidak berlabelkan Islam. Kondisi semacam ini dilatar belakangi oleh berbagai macam hal. Salah satunya adalah faktor ekonomi. PTAIN dirasa kurang mampu bersaing dan tidak mampu merebut peluang dan kesempatan yang tersedia dalam memasuki lapangan kerja.¹⁴ Meskipun tidak setiap mereka (mahasiswa) yang masuk dan belajar di

¹²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan.*, hlm. 16.

¹³Imam Suprayogo, *Universitas Islam Unggul: Refleksi Pemikiran Pengembangan Kelembagaan dan Reformulasi Paradigma Keilmuan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 5.

¹⁴Muhammad Fathurrohman & Sulityorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam: Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik (Praktik dan Teoritik)*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 139.

pendidikan tinggi Islam selalu didasari oleh motivasi nafkah atau demi “kepentingan ekonomi” di kemudian harinya, namun tidak bisa disangkal adanya keterkaitan antara dunia pendidikan dengan cita-cita lapangan kerja dan kehidupan sejahtera bagi alumni dan tamatannya. Sedemikian erat hubungan tersebut, sehingga besar kecilnya animo calon mahasiswa yang berminat dan mendaftarkan diri ke sebuah perguruan tinggi tertentu, sebagian didasari oleh cerah tidaknya masa depan mereka dalam hal lapangan kerja yang bakal diperoleh setelah melakukan studi.

b) Dosen

Upaya pembenahan kurikulum, perbaikan sarana dan prasarana, manajemen perguruan tinggi merupakan hal penting, namun tanpa didukung dosen yang bermutu dan sejahtera, semua itu menjadi kurang bermakna. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi mutu pendidikan tinggi adalah dosen yang bermutu.

Dosen yang bermutu dapat diukur dengan lima faktor utama, yaitu kemampuan profesional, upaya profesional, kesesuaian antara waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional, kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya, dan kesejahteraan yang memadai.¹⁵

Menurut Nurhayati Djamas pendidikan tinggi di Indonesia baik umum maupun Islam belum memiliki standar ukuran produktifitas maupun efisiensinya karena adanya nilai-nilai yang dipandang tak dapat dihitung secara material pada produktifitas perguruan tinggi tersebut. Namun demikian, di era pasar bebas pada abad ke-21, perguruan tinggi termasuk PTAIN harus mengantisipasi berbagai tuntutan.¹⁶

c) Kurikulum

Salah satu upaya fundamental dan strategis terkait kurikulum yang ditempuh PTAIN adalah melakukan rekonstruksi paradigma keilmuan, dengan meletakkan agama sebagai basis ilmu pengetahuan. Upaya ini dipandang fundamental dan strategis, bahkan dalam kerangka pengembangan beberapa PTAI kedepan, upaya ini mendapatkan prioritas terpenting yang perlu dibenahi adalah karena konstruk keilmuan ini merupakan nafas dan ruh perguruan tinggi. Persoalan terpenting pengembangan ilmu diperguruan tinggi Islam adalah tidak

¹⁵Nurhayati Dajamas, *Strategi Peningkatan Mutu Dosen PTAI*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2005), hlm. 2.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 4.

relevannya konstruk keilmuan yang dikembangkan dengan visi dan misi yang hendak dijalankan. Apa yang dipahami mengenai ilmu, budaya, dan seni, yang dikaitkan dengan agama dalam hal ini Islam, seringkali menunjukkan pemahaman yang sangat sempit, yang kemudian berimplikasi pada sempitnya wilayah garapan Perguruan Tinggi Islam, seperti yang dikesankan itu.¹⁷

Perbaikan tersebut tentunya membutuhkan reformulasi kurikulum yang tepat. Disamping itu reformulasi tersebut juga dibutuhkan demi perbaikan mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya satupun Perguruan Tinggi Islam Negeri yang masuk dalam daftar peringkat perguruan tinggi yang diperhitungkan (lihat tabel).

Tabel Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Tahun 2017 Versi webometrics¹⁸

Peringkat Indonesia	Peringkat at Dunia	Nama Universitas
1	955	Universitas Indonesia
2	1004	Universitas Gadjah Mada
3	1211	Institut Teknologi Bandung
4	1345	Institut Pertanian Bogor
5	1873	Universitas Brawijawa
6	1973	Universitas Padjajaran Bandung
7	1991	Universitas Diponegoro
8	2314	Universitas Udayana
9	2366	Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta
10	2370	Universitas Riau
20	3502	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
46	4528	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
48	4591	UIN Sunan Ampel Surabaya
49	4603	UIN Raden Fatah

Dari tabel 100 peringkat perguruan tinggi terbaik di Indonesia, baru satu PTAIN yang mampu masuk dalam daftar 20 besar peringkat tersebut. Kenyataan inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana upaya

¹⁷Imam Suprayogo & Rasmianto, *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam.*, hlm. 51-52.

¹⁸www.webometrics.info. Diakses pada tanggal 21 November 2017.

perguruan-perguruan tinggi Islam negeri dalam mengembangkan kualitasnya termasuk dengan pengaturan kurikulum yang baik.

Transformasi kelembagaan PTAI terbeukti mampu meningkatkan peringkat PTAI dari yang sebelumnya, sehingga dapat bersaing dengan kampus-kampus ternama di Indonesia.

d) Sarana Prasarana

Berbicara soal sarana dan prasarana maka terkait dengan anggaran yang dimiliki PTAI untuk mengadakan sarana prasarana tersebut. Karena pada awalnya merupakan lembaga dibawah pendidikan tinggi agama, maka semuanya berada di bawah pembinaan dan pembiayaan Kementerian Agama dan pengawasan Kementerian Riset dan Teknologi. Dari sudut alokasi anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sektor Agama yang jumlahnya sangat terbatas untuk memajukan PTAIN. Belum lagi anggaran tersebut harus dibantukan juga untuk PTAS.¹⁹

Kenyataan tersebut membawa dampak PTAIN mengalami keteringgalan dalam sarana dan prasarana. Hal ini diperparah lagi dengan statusnya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang hanya fokus terhadap ajaran agama, PTAIN sulit melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga *funding* yang dapat membantu perkembangan PTAIN.

e) Pengelola

Setiap lembaga pendidikan membutuhkan pengelola yang akan membantu berjalanya sistem yang ada didalamnya. Terkait dengan masalah pengelolaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan budaya perguruan tinggi, yaitu:

- 1) Pengembangan manajemen yang berkualitas dengan mengembangkan gagasan-gagasan manajemen korporasi dalam perguruan tinggi Islam menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.
- 2) Kepemimpinan yang visioner. Tipe pemimpin yang seperti ini biasanya memiliki ciri utama: berkarakter, berkarisma, berkompeten terhadap lembaga yang dipimpinya.

¹⁹Komarudin Hidayat & Hendro Prasetyo, *Problem dan Prospek LAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2000), hlm. v.

- 3) Mampu mengembangkan budaya kerjasama. Dengan membangun dan memperluas jaringan kerjasama (*networking*) diharapkan keterbatasan-keterbatasan harus diatasi.²⁰

Ketiga hal di atas tidak hanya dibutuhkan PTAIN akan tetapi semua lembaga pendidikan tinggi juga memerlukanya ketika ingin mengedepankan lembaganya. Lebih-lebih bagi PTAIN yang baru berproses pada perubahan maka harus lebih *intens* dalam meningkatkan kinerjanya.

C. TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PTAIN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Gagasan mengubah IAIN menjadi UIN, pertama kali dimulai dengan perubahan status IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian diikuti oleh beberapa IAIN atau STAIN yang ada di Indonesia. Menurut Azyumardi Azra sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo dan Rasmianto, ada beberapa landasan kuat mengapa IAIN/STAIN harus berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) yaitu:

1. Untuk memberikan peluang penataan pendidikan tinggi yang lebih luas pada tamatan madrasah. Hal ini terjadi karena berubahnya IAIN menjadi UIN akan bertambah jumlah fakultas dan program studi yang berdampak pada penambahan jumlah mahasiswa yang dapat diterima.
2. Agar tamatan-tamatan UIN dapat memasuki dunia lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini terjadi karena dengan dibukanya Fakultas-Fakultas Umum disamping Fakultas Agama yang telah ada, tamatan UIN tidak hanya dapat bekerja di lembaga-lembaga keagamaan seperti Departemen Agama, Madrasah dan Pesantren, melainkan juga dapat bekerja diberbagai sektor yang lebih luas seperti di perbankan, perusahaan-perusahaan industri dan jasa serta berbagai sektor yang lebih luas lainnya.
3. Agar UIN dapat menampung tamatan Madrasah Aliyah yang keadaanya sudah berubah menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercorak keagamaan. Karena, diketahui bahwa sejak tahun 1994 telah terjadi perubahan pada kurikulum Aliyah dari yang semula sebagai Kurikulum untuk Sekolah Menengah Keagamaan menjadi Kurikulum SMA yang

²⁰Muhammad In'am Esha, *Institutional Transformation: Reformasi dan Modernisasi.*, hlm. 115-116.

bercorak keagamaan. Sehingga, lulusan MA tidak lagi sama dengan lulusan MA pada tahun-tahun sebelumnya.

4. Untuk meningkatkan martabat Perguruan Tinggi Islam yang berada di bawah Kementerian Agama sehingga sejajar dengan martabat Perguruan Tinggi Umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional dan jika dimungkinkan lebih tinggi lagi. Karena perguruan tinggi Islam seperti IAIN/STAIN masih diposisikan sebagai perguruan tinggi kelas dua dan dimarginalkan atau dilihat sebelah mata.²¹

Selanjutnya dari gagasan-gagasan tersebut terwujudlah apa yang dicitakan dengan transformasi kelembagaan PTAIN yaitu dari IAIN/STAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Perubahan tersebut sangat berpengaruh bagi kemajuan PTAIN kedepan.

Di antara bentuk perubahan status IAIN/STAIN menjadi Universitas yang membawa pengaruh terhadap manajemen lembaga yaitu.

a. Dibukanya Program Studi Agama dan Ilmu-Ilmu Umum

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1/O/SKB/2004 dan juga nomor ND/B.V/I/Hk.00.1/058/04 tentang Perubahan Bentuk IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga dan STAIN Malang menjadi UIN MALANG, terlihat jelas bagaimana pemerintah membukakan kran bagi PTAIN untuk membuka program studi selain agama. Pada poin ketiga (a) dan (b) diputuskan bahwa:

- 1) Menteri Pendidikan Nasional melakukan pengawasan akademik terhadap program studi selain ilmu-ilmu Agama Islam pada UIN Sunan Kalijaga dan UIN Malang.
- 2) Menteri Agama melakukan pengawasan umum pada UIN Sunan Kalijaga dan UIN Malang.

Selanjutnya kedua poin tersebut dijelaskan lagi dalam poin keempat bahwa:

- 1) Pengawasan akademik sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga a). dan penyelenggaraan program studi selain ilmu-ilmu agama Islam baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan izin

²¹Imam Suprayogo & Rasmianto, *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam.*, hlm. 12-13.

penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, sesuai peraturan yang berlaku.

- 2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksudkan diktum ketiga b) termasuk penyediaan sumber daya dan fasilitas dilaksanakan oleh menteri Agama melalui Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.²²

Uraian keputusan pemerintah di atas adalah bentuk landasan normatif tranformasi PTAIN dari IAIN/STAIN menjadi Universitas yang diikuti dengan berbagai kebijakan menyangkut penyelenggaraan sistem kelembagaan. Tranformasi tersebut membawa implikasi yang sangat mendasar bagi PTAI untuk membuka jurusan selain agama. Hal ini sesuai dengan semangat awal untuk melakukan islamisasi ilmu atau dalam bahasa Amin Abdullah adalah basis keilmuan integratif-interkoneksi.

b. Basis Keilmuan Yang Variatif

Proses transformasi yang ditandai dengan dibukanya program studi di luar bidang agama membawa konsekuensi pada aspek akademik, dalam hal ini bidang keilmuan yang diajarkan. Selain mengajarkan ilmu-ilmu keislaman sebagai ciri khas Perguruan Tinggi Agama Islam, ilmu-ilmu umum diluar keislaman juga mulai diajarkan di kampus-kampus UIN. UIN Sunan Kalijaga contohnya, sejak terjadi tranformasi dari IAIN menjadi UIN hingga saat ini telah membuka Fakultas baru seperti Sains dan Teknologi serta Fakultas Sosial dan Humaniora. Dibukanya beberapa Fakultas tersebut tentu dibarengi dengan adanya ilmu-ilmu diluar keislaman seperti, fisika, biologi, matematika dan lainnya.

Pengembangan paradigma keilmuan itu sendiri merupakan konsekuensi logis dari transformasi IAIN yang menjadi Universitas yang mengembangkan mandat kelembagaan untuk mengembangkan “ilmu-ilmu sekular” dengan “ilmu-ilmu keislaman”. Konsep pendidikan ini mengambil dari semangat pendidikan Qur’ani, yakni pendidikan yang utuh, yang menyentuh domain yang disebut Allah dalam kitab suci (*hadlarah al-nash*), juga mendalam dalam kajian-kajian keilmuannya (*hadlarah al-‘ilm*), serta peduli dengan wilayah ‘amali, praksis nyata dalam realitas dan etika (*hadlarah al-falsah*).²³

²²UIN Sunan Kalijaga, *Kumpulan Peraturan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi, 2004), hlm. 3-4.

²³Amin Abdullah, dkk, *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 15

c. Akses Jaringan Kerjasama Yang Lebih Luas

Dalam rangka memperkuat berbagai aspek yang seharusnya dikembangkan, kampus sebagai sebuah lembaga pendidikan perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama diorientasikan pada kegiatan yang saling menguntungkan. Dari hasil kerjasama ini, nantinya akan membantu perkembangan kampus menuju ke arah yang lebih baik.

Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada satu institusi manapun yang bisa hidup dan berkembang tanpa kerjasama. Bahkan institusi sebesar apapun pasti membutuhkan kerjasama, karena ia pasti memiliki keterbatasan dalam sumberdaya organisasinya. Kerjasama atau *collaboration* ini pada dasarnya adalah *Partnership, Cooperation, Group Effort, Association, Alliance, Retionship, teamwork*.²⁴

Akan halnya kampus PTAIN dapat tetap eksis hingga saat ini tentunya didukung oleh kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi tersebut. Dengan adanya transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi Universitas, kran kerjasama tersebut semakin terbuka lebar. Universitas Islam Negeri Jakarta contohnya, merupakan salah satu PTAIN yang mampu menjalin kerjasama dalam bidang kesehatan dengan Japan Bank For International Cooperation (JBIC).²⁵ Kerjasama-kerjasama dalam bidang seperti ini tentu tidak didapatkan ketika PTAIN hanya memiliki program studi agama, dan harus diakui bahwa program studi umum merupakan konsekuensi dari transformasi lembaga pendidikan tinggi Islam.

D. TRANSFORMASI UIN SUNAN KALIJAGA: SEBUAH POTRET

Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga secara yuridis formal telah final dengan ditandatanganinya Kepres Nomor 50 Tahun 2004 pada tanggal 21 Juni 2004 oleh Presiden R.I. Megawati Soekarnoputri.²⁶ Sebagai embrio cikal bakal berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, tentunya UIN Sunan Kalijaga memiliki bentuk dan strategi yang dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi universitasnya, sehingga tetap menjadi pilihan masyarakat.

²⁴M. Alfatih Suryadilaga & Facruddin Faiz (ed), *Profil Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1951-2004*, (Yogyakarta: Suka Press, 2004), hlm. 16.

²⁵Yusron, *FIKK Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, <http://fkik.uinjkt.ac.id/index.php/profile/sejarah-tentang-fkik>, Diakses pada tanggal 12 Juni 2013.

²⁶Amin Abdullah, *Kerangka Dasar Keilmuan*, hlm. 11.

Untuk melihat bagaimana pengaruh dari transformasi kelembagaan yang ada di UIN Sunan Kalijaga terhadap manajemen lembaga pendidikan tinggi, berikut ini dipaparkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang dimaksud.

1. Kelembagaan UIN Sunan Kalijaga

Pada saat resmi menggunakan nama “IAIN Sunan Kalijaga” tanggal 15 Juli 1965, UIN Sunan Kalijaga hanya memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari’ah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Tarbiyah. Penambahan fakultas baru terjadi antara periode 1972-1996, dengan berdirinya Fakultas Dakwah dan Fakultas Adab.²⁷

Sekalipun mengalami penambahan fakultas, sejatinya UIN Sunan Kalijaga pada saat itu masih berkuat pada satu satu jenis program studi saja, yaitu program studi dengan basis keilmuan Islam. Perubahan mendasar baru terasa ketika pada tahun 2002 di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, dalam rangka berubah menjadi Universitas, UIN Sunan Kalijaga memulai perkembangan dengan konsep “IAIN *with wider mandate*” (IAIN dengan mandat yang lebih luas). Dengan mengembangkan konsep ini, UIN Sunan Kalijaga telah mengembangkan jurusan/program studi bidang ilmu-ilmu sosial dan ilmu eksakta yang dalam tahapan selanjutnya di *up-grade* menjadi Fakultas-Fakultas, Jurusan-Jurusan, dan Program-Program Studi.²⁸

Pengembangan kelembagaan UIN Sunan Kalijaga ini kemudian mendapat legitimasi secara formal setelah terjadi perubahan kelembagaan dari IAIN Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Di antara Fakultas-Fakultas yang merupakan pengembangan dari transformasi kelembagaan yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Sosial Humaniora dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Paradigma Keilmuan

Pada saat ini dunia keilmuan modern banyak dipengaruhi oleh paradigma keilmuan yang bersifat dikotomis sebagai buah dari berkembangnya pemikiran sekular Barat. Tentunya, paradigma pengetahuan semacam itu tidak sejalan dengan paradigma keilmuan Islam yang bersendikan Tauhid.

Hal inilah yang kemudian memunculkan banyak pemikiran di kalangan Islam yang mencoba mengembalikan ruh pengembangan keilmuan bersifat

²⁷M. Alfatih Suryadilaga & Facruddin Faiz (ed), *Profil Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga*, hlm. 10.

²⁸*Ibid.*, hlm. 11-12.

integratif. Demikian halnya dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kampus ini memiliki paradigma pengembangan keilmuan yang bersifat integratif yang dimetaforkan dalam sebuah jaring laba-laba yang kemudian sering disebut dengan paradigma keilmuan integratif-interkoneksi. Tujuan dari pengembangan paradigma keilmuan tersebut adalah agar cara pandang civitas akademika UIN Sunan Kalijaga semakin luas dan komprehensif.²⁹

Konsep keilmuan seperti di atas, selain bersifat integratif dan interkoneksi dalam wilayah internal ilmu-ilmu ke-Islaman, juga dikembangkan melalui integrasi interkoneksi ilmu-ilmu ke-Islaman dengan ilmu-ilmu umum. Integrasi dan interkoneksi dalam ilmu-ilmu umum tersebut terjadi baik pada bidang ilmu humaniora (*humanitis*), ilmu-ilmu sosial (*sosial sciences*), maupun ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*).

E. MANAJEMEN PENGEMBANGAN UIN KEDEPAN

Sebagai sebuah universitas yang belum lama lahir, keberadaan UIN tentu saja masih diliputi berbagai kekurangan dan kelemahan. Maka, dari sini perlu kiranya para pimpinan UIN sesegera mungkin mengidentifikasi problem dan atau kelemahan yang dihadapi UIN untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Setidaknya mereka bisa membuat skala prioritas secara berjenjang sehingga terlihat aspek-aspek apa saja yang penanganannya bisa menyusul kemudian. Kategorisasi prioritas ini didasarkan pada tingkat kebutuhan UIN sendiri sebagai universitas yang baru sama sekali.

Terkait dengan skala prioritas pengelolaan itu, Rahim sebagaimana dikutip Mujamil Qomar menawarkan tiga bidang penataan yang utama sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan. Hal ini dilakukan dengan mengkaji ulang posisi fakultas, program studi, dan konsentrasi dari berbagai Fakultas Agama untuk melihat kaitannya dengan visi UIN dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.
2. Penataan bidang akademik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi UIN menghadapi tantangan masa depan.
3. Penataan bidang administrasi. Hal ini untuk mengadakan deregulasi dan pemberdayaan unit-unit pelayanan yang ada di UIN.³⁰

²⁹Amin Abdullah, *Kerangka Dasar Keilmuan*., hlm. 22.

³⁰Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*., hlm. 117-118.

Adapun A. Qodry Azizy menawarkan empat macam cara dalam mengembangkan UIN ke depan, yaitu sebagai berikut.

1. Komitmen moralitas
2. *The UIN shall be a moral institution*. Ini yang harus ditunjukkan.
3. Sistem dan Iklim

Harus ada kedisiplinan, menghargai waktu, bekerja keras, sangsi tegas, dan juga *reward*.

1. Budaya dosen dan mahasiswa
2. Dosen harus berprestasi, termasuk dalam pengembangan seni dan budaya, sedangkan mahasiswa harus bisa menggalakan diskusi. Perilaku keseharian sejalan dengan ajaran Islam. Gaya berpakaian, jenis aktifitas, dan sebagainya harus mengarah pada *amaliah* Islam.
3. Staf dan jajaran pimpinan

Staf sebagai pelayan masyarakat sehingga orientasi mengarah kepada masyarakat.³¹

Walaupun diakui masih banyak yang perlu diperbaiki dalam PTAIN, akan tetapi sejak bergulirnya wacana transformasi kelembagaan dari IAIN/STAIN menjadi UIN telah membawa berbagai macam implikasi menyangkut manajemen lembaga pendidikan tinggi Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian panjang materi di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Transformasi PTAIN dalam hal ini IAIN atau STAIN menjadi Universitas Islam Negeri merupakan sebuah tuntutan zaman yang tidak bisa dihindarkan. Perkembangan zaman yang semakin maju membutuhkan cara menyikapinya sesuai dengan konteks kemajuan, sebab apabila disikapi secara stagnan maka umat Islam akan semakin tertinggal.
2. Kelembagaan PTAIN pada awalnya merupakan lembaga dibawah Kementerian Agama sehingga segalanya menyangkut manajemen kelembagaan menyesuaikan dengan aturan Kementerian Agama. Dalam perkembangan selanjutnya PTAIN mampu melakukan transformasi secara kelembagaan dengan demikian terjadi pula perubahan dalam bentuk manajemen kelembagaan. Dalam mengembangkan program studi

³¹*Ibid.*, hlm. 118.

keislaman PTAIN masih dibawah naungan Kementrian Agama, dan untuk program studi umum di bawah Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi.

3. UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari Perguruan Tinggi Agama Islam yang mengalami transformasi secara kelembagaan. Transformasi tersebut membawa dampak yang cukup signifikansi bagi kampus ini. Dari sebelumnya Fakultas-Fakultas yang dimiliki hanya berbasis agama, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah. Saat ini setelah berubah menjadi Universitas, UIN Sunan Kalijaga memiliki Fakultas-Fakultas Umum yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Sosial dan Humaniora dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Transformasi kelembagaan PTAIN membutuhkan pengaturan (manajemen) yang baik agar cita-cita universitas Islam dapat terwujud. Oleh sebab itu baik antara pemerintah, lembaga dan masyarakat perlu menumbuhkan semangat membangun lembaga pendidikan Islam. Karena tidak bisa disangkal bahwa kemajuan lembaga pendidikan Islam adalah tolok ukur dari keberhasilan penganut agama Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

_____, dkk, *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2004

Ali Nizar & Syatibi Ibi, *Manajemen Pendidikan Islam: Ikhtiar Menata Kelembagaan Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Isfahan, 2009

Arikunto Suharsimi, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2008

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Petunjuk Teknis Ketenagaan PTAI*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2004

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Esha Muhammad In'am, *Institutional Transformation: Reformasi dan Modernisasi Pendidikan Tinggi Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009

Fathurrohman Muhammad & Sulityorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam: Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik (Praktik dan Teoritik)*, Yogyakarta: Teras, 2012

M. Alfatih Suryadilaga & Facruddin Faiz (ed), *Profil Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1951-2004*, Yogyakarta: Suka Press, 2004

Qomar Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Malang: Erlangga, 2007

Suprayogo Imam & Rasmianto, *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam: Refleksi Perubahan LAIN/STAIN Menjadi UIN*, Malang: UIN Malang Press, 2008

_____, *Universitas Islam Unggul: Refleksi Pemikiran Pengembangan Kelembagaan dan Reformulasi Paradigma Keilmuan Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009

Suwito & Nata Abuddin, *Proses Perubahan LAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Rekaman Media Massa*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2002

UIN Sunan Kalijaga, *Kumpulan Peraturan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi, 200

www.webometrics.info. Diakses pada tanggal 21 November 2017.